

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi investasi yang panjang untuk peradaban manusia dalam melangsungkan kehidupan di dunia. Oleh karena itu Pendidikan dijadikan komponen penting dalam konteks pembangunan bangsa dan negara (Irawan & Desyanri, 2019). Pendidikan menjadi tujuan utama bangsa Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi manusia yang memiliki intelektual dan solusi dari pemikiran yang cerdas, untuk menghadapi segala masalah yang dihadapinya baik untuk kehidupan sekarang maupun mendatang. Dalam pendidikan terdapat proses pembelajaran, yang dalam kegiatannya tersebut merupakan proses atau tahapan untuk menjadi manusia yang memiliki wawasan luas.

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam proses pembelajaran untuk tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi dan tujuan pendidikan suatu institusi atau lembaga pendidikan. Kurikulum juga menjadi sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada para peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum perlu untuk terus dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun (Oksari, 2022). Arah dan tujuan kurikulum pendidikan akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sifatnya yang dinamis dalam menyikapi perubahan zaman menjadikan kurikulum mutlak harus bersifat fleksibel dan futuristik.

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kurikulum terus menerus mengalami pengembangan. Usai zaman Orde Baru berakhir atau sejak dimulainya masa reformasi, terjadi 5 (lima) kali perubahan kurikulum dengan tujuan penyempurnaan. Mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004,

Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) tahun 2006, Kurikulum 2013 (K13), Kurikulum 2013 Revisi, dan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum KBK dan kurikulum KTSP hakikatnya sama, yaitu ingin menjadikan pendidikan yang mampu mengembangkan keutuhan kompetensi secara utuh dan mandala. Perbedaannya adalah KBK masih bersifat uji coba karena minimnya dasar pijakan, sementara KTSP memiliki target pengembangan kompetensi dan pijakan operasional yang sangat kuat, antara lain Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, terbit juga Permendikbud No 23 tahun 2006 tentang SKL (Standar Kompetensi Lulusan), dan lain-lain. Kurikulum 2013 (K.13) merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum KTSP 2006. Penamaan kurikulum 2013 diambil karena penetapan kebijakan kurikulum ini dilakukan pada tahun 2013. Kurikulum 2013 ini memiliki substansi kesamaan dengan kurikulum KTSP 2006, yang sama-sama kurikulum berbasis kompetensi. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kurikulum 2013 ini lebih memperjelas target pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, proses pembelajaran, dan evaluasi penilaian (Fauzan & Fatkhul, 2022).

Kurikulum 2013 Revisi lahir sebagai akibat dari penyempurnaan kurikulum 2013. Perubahan yang menjadi poin penting dalam kurikulum 2013 revisi ini adalah menggunakan metode pembelajaran aktif yang menjadikan peserta didik sebagai pemeran utama, penyederhanaan aspek penilaian guru, hanya mata pelajaran agama dan PPKN yang memiliki penilaian sikap KI 1 dan KI 2, pembiasaan berfikir ilmiah sejak SD, penerapan 5M yakni mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis dan menciptakan.

Sejak masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia, hampir semua sektor ikut terdampak, salah satunya sektor pendidikan. Masa pandemi ini menyebabkan *learning loss* atau ketertinggalan pembelajaran yang menyebabkan tidak tercapainya kompetensi peserta didik (Supangat, 2021). Salah satu upaya Kemendikbudristek untuk melakukan pemulihan pembelajaran adalah dengan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar atau dikenal juga dengan Kurikulum Merdeka.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini dilaksanakan secara bertahap dan wajib diterapkan pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak dan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Kurikulum Merdeka Belajar ditujukan untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah seperti SMP/SMA/SMK/ sederajat (Albertus, W.L., & Vhalery, 2022). Kurikulum ini berfungsi sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dalam pembelajaran yang relevan dan interaktif, salah satunya dengan membuat proyek. Pembelajaran tersebut akan membuat peserta didik penasaran dan mengembangkannya dengan isu-isu sesuai di lapangan.

Salah satu komponen penting dalam Kurikulum Merdeka yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran adalah Kurikulum Operasional Sekolah. Pada pendidikan kejuruan, Kurikulum Operasional Sekolah dirancang secara integratif dengan memperhatikan tujuan dan kebutuhan peserta didik, sekolah dan IDUKA. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik yang sudah melakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk bekerja di bidang tertentu. Pendidikan SMK bertujuan untuk mengembangkan tenaga kerja yang mampu dan terampil sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja, lalu memiliki kemampuan untuk menggunakan dan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Selain dengan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar atau Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek mencoba melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK. Penyelenggaraan program SMK Pusat Keunggulan merupakan salah satu strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan rencana strategis peningkatan kualitas pendidikan SMK tahun 2020-2024. Program SMK Pusat Keunggulan diharapkan mampu menjadi contoh sekolah lainnya agar dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, dan mampu menghasilkan lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan, melanjutkan pendidikan dan berwirausaha.

Namun dalam pelaksanaannya di sekolah, masih mengalami kendala yang mempengaruhi kepada tercapainya tujuan dilaksanakan program atau kebijakan tersebut. Fitri Rahmawati dalam Seminar Nasional Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Fakultas Teknik UNY tanggal 21 September 2021 menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam menjalankan program SMK Pusat Keunggulan di era Kurikulum Merdeka adalah menciptakan lulusan SMK yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri/IDUKA.

Selain kendala dalam menjalankan program, kendala lain muncul dalam hal pengimplementasian Kurikulum Merdeka, khususnya pada Kurikulum Operasional Sekolah. Hal tersebut disetujui oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum di 9 (Sembilan) SMK kota dan kabupaten Tasikmalaya yang direkomendasikan oleh pihak Dinas Pendidikan wilayah XII Provinsi Jawa Barat. Berikut data pra-penelitian dengan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum di 9 (Sembilan) SMK kota dan kabupaten Tasikmalaya pada bulan Maret sampai Mei 2023.

Di SMKN 2 Tasikmalaya kendala dalam mengimplementasikan Kurikulum Operasional Sekolah sebagai dokumen dari Kurikulum Merdeka adalah mengubah paradigma guru dalam proses pembelajaran. Tidak sedikit guru yang masih menerapkan pola pembelajaran konvensional, dan guru yang masih dibingungkan dengan format dalam pembuatan administrasi akademik. Selain itu, keterbatasan industri dalam menerima pekerja dari lulusan SMK, menjadi kendala yang sangat krusial. Sekolah sedang berusaha untuk menerapkan karakter kepada siswa yang sesuai dengan budaya kerja industri dan membuat lulusannya nanti memiliki sertifikasi kompetensi lulusan yang terjamin dan terpercaya, apalagi dalam program pembelajaran difokuskan kepada program BMW (bekerja, melanjutkan, wirausaha).

Di SMKN 3 Tasikmalaya kendala yang dihadapi tidak berbeda jauh dengan yang ada di SMKN 2 Tasikmalaya. Kendala lain yaitu berkenaan dengan penyediaan sarana prasarana yang tidak bisa mengikuti perkembangan di industri. Sehingga sekolah diharuskan membangun kemitraan strategis dengan perusahaan yang berkaitan dengan program keahlian masing-masing.

Tanty Dwi Mustika, 2023

STUDI TENTANG KURIKULUM OPERASIONAL SEKOLAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA PROGRAM KEAHLIAN MANAJEMEN PERKATORAN DAN LAYANAN BISNIS DI SMKN 1 TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Di SMKN 4 Tasikmalaya kendala yang dihadapi yaitu pada pengorganisasian dan pengaplikasian Profil Pelajar Pancasila. Sebagian besar guru masih dibingungkan dalam pembuatan proyek yang tepat untuk digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Selain itu ketika guru mengikuti diklat mengenai Kurikulum Merdeka, selalu ada perbedaan persepsi di setiap pemateri diklat. Hal tersebut yang kemudian membuat guru kebingungan dalam pembuatan administrasi pembelajaran dan pengorganisasian proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Di SMKS Bina Putera Nusantara (BPN) kendala yang dihadapi yaitu selain dengan mengubah pola pikir guru proses pembelajaran, tetapi juga dalam format penyusunan KOS yang masih membuat guru bingung. Hal ini terjadi karena tidak adanya acuan dan format baku dalam pengembangan KOS. Kendala lain yang timbul adalah berkaitan dengan mengubah paradigma siswa dengan karakter yang beragam untuk setiap siswanya. Sekolah menekankan kepada pembentukan karakter yang sesuai dengan budaya dunia kerja.

Tidak berbeda jauh dengan kendala di sekolah-sekolah yang telah di jelaskan sebelumnya, SMKN Rajapolah sedang melakukan upaya dalam merubah paradigma guru dalam proses pembelajaran. Selain dengan diadakannya diklat, sosialisasi, tetapi juga dengan refleksi guru untuk menyamakan persepsi mengenai Kurikulum Merdeka. Meskipun tidak mudah bagi sekolah untuk melaksanakannya, namun Kepala Sekolah SMKN Rajapolah berharap dengan diadakannya kegiatan tersebut, dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi kepada guru, untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Di SMKN Kadipaten kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan mengklasifikasikan kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Siswa memiliki karakter dan motivasi yang berbeda-beda, sehingga berpengaruh pada proses pembelajaran yang diarahkan pada program BMW. Selain itu, dalam proses pencarian industri yang sesuai dengan program keahlian pun, sekolah masih terkendala karena industri/perusahaan menginginkan profit. Juga kesiapan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai jika dibandingkan dengan industri.

Di SMKN Manonjaya kendala terbesar yang dihadapi adalah berkenaan dengan merubah paradigma atau pola pikir guru dalam pembelajaran, terutama pada guru senior. Pengimplementasian kurikulum paradigma baru ini erat kaitannya dengan penggunaan teknologi. Sehingga guru harus beradaptasi pada penggunaan teknologi di setiap proses akademik. Berkenaan dengan hal tersebut dan juga keterbatasan-keterbatasan lain yang dimiliki, tidak sedikit guru senior yang belum mampu menyesuaikan dan memahami secara menyeluruh Kurikulum Merdeka.

Di SMKS NU Tasikmalaya kendala yang dihadapi adalah mengenai konten dalam administrasi guru. Format dan pergantian istilah dalam administrasi guru dinilai terlalu dipaksakan. Kurikulum Merdeka memang memiliki prinsip merdeka dalam proses pembelajaran baik kaitannya dengan guru, peserta didik, dan pihak lain yang berkaitan. Namun dalam pengimplementasiannya secara administratif guru masih tidak diberi ruang untuk mengeluarkan ide kreatifnya. Sebagai contoh adalah ketika guru ingin menerapkan materi/mata pelajaran di luar kurikulum yang sudah dibuat di dapodik, tetapi ketika pelaporan di dapodik dilakukan, materi/mata pelajaran tersebut tidak diakui/tidak *support* di sistem.

Dalam Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22/D/O/2021 tentang Penetapan SMK PK tahun 2021 tahap 1, SMKN 1 Tasikmalaya menjadi salah satu SMK yang melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Dalam draft Salinan Keputusan tersebut SMKN 1 Tasikmalaya berada di urutan ke 146 dari 611 Sekolah Menengah Kejuruan yang terpilih untuk menjalankan program SMK PK tahap 1 tahun 2021. Tidak berbeda jauh dengan kendala di sekolah-sekolah yang telah di jelaskan sebelumnya, SMKN 1 Tasikmalaya memiliki guru dengan kompetensi dan profesionalisme yang relatif beragam. Sehingga ada saja kesalahan persepsi dalam mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Selain itu pengembangan budaya kerja pada peserta didik dinilai belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat pra-penelitian tersebut menunjukan bahwa sekolah masih dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, yang menjadikan pengimplementasian Kurikulum Operasional Sekolah dalam Kurikulum Merdeka belum optimal. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan

Tanty Dwi Mustika, 2023

STUDI TENTANG KURIKULUM OPERASIONAL SEKOLAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA PROGRAM KEAHLIAN MANAJEMEN PERKATORAN DAN LAYANAN BISNIS DI SMKN 1 TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengimplementasian kurikulum adalah kesiapan unsur-unsur yang akan mengaktualisasikan kebijakan tersebut (Majid A. , 2014). Kesiapan tersebut dapat dilihat dari kesiapan guru, peserta didik, sarana prasarana, manajemen kepala sekolah, lingkungan sekolah, masyarakat, dan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu permasalahan kesiapan penerapan kurikulum ini adalah masalah penting yang harus dikaji dan dengan segera harus ditemukan solusinya, karena ini akan menimbulkan pada penerapan kurikulum yang tidak optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah.

Kajian permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada kesiapan sekolah dengan menggunakan Kurikulum Operasional Sekolah. Mengingat Kurikulum Operasional Sekolah merupakan komponen penting dalam Kurikulum Merdeka yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu lulusan khususnya lulusan SMK yang mampu menghadapi kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Studi Tentang Kurikulum Operasional Sekolah Dalam Rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Program Keahlian Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis Di SMKN 1 Tasikmalaya”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Penerapan Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini dilaksanakan secara bertahap dan wajib diterapkan pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak dan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

Berkenaan dengan penerapan Kurikulum Merdeka di SMK, pemerintah mengharapkan lulusannya terserap di dunia industri. Seperti yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mengatur bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Salah satu komponen penting dalam

Kurikulum Merdeka yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran adalah Kurikulum Operasional Sekolah. Pada pendidikan kejuruan, Kurikulum Operasional Sekolah dirancang dan dikembangkan secara integratif dengan memperhatikan tujuan dan kebutuhan peserta didik, sekolah dan IDUKA.

Dilihat dari temuan lapangan, SMKN 1 Tasikmalaya membuktikan telah dan sedang mengimplementasikan Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) dalam proses penyelenggaraan pembelajaran. Namun dalam proses pengimplementasiannya, sekolah masih memiliki problematika yang dapat menghambat kepada tercapainya tujuan pendidikan SMK.

Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada kesiapan sekolah dalam mengoptimalkan implementasi kurikulum operasional dalam mendukung kurikulum merdeka untuk meningkatkan mutu pendidikan SMK yang berimbas pada peningkatan kompetensi lulusan siswa. Kesiapan sekolah ini dapat dilihat dari komponen-komponen utama yang terdapat dalam kurikulum operasional sekolah yang diimplementasikan pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMKN 1 Tasikmalaya yaitu karakteristik dan tujuan program keahlian, pengorganisasian pembelajaran, rencana dan evaluasi pembelajaran, pendampingan dan pengembangan professional guru.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran konsep Kurikulum Operasional Sekolah pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di SMKN 1 Tasikmalaya?
2. Bagaimana kesiapan program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di SMKN 1 Tasikmalaya dengan menggunakan Kurikulum Operasional Sekolah?

3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Kurikulum Operasional Sekolah pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di SMKN 1 Tasikmalaya?
4. Strategi apa yang dilakukan dalam implementasi Kurikulum Operasional Sekolah pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di SMKN 1 Tasikmalaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan untuk melaksanakan kajian secara ilmiah tentang Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di SMKN 1 Tasikmalaya. Adapun tujuan yang ingin dicapai secara khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran konsep Kurikulum Operasional Sekolah pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di SMKN 1 Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui kesiapan program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di SMKN 1 Tasikmalaya dengan menggunakan Kurikulum Operasional Sekolah
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Kurikulum Operasional Sekolah pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di SMKN 1 Tasikmalaya
4. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam implementasi Kurikulum Operasional Sekolah pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di SMKN 1 Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Teoritis
 - a. Menambah dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana pengimplementasian Kurikulum Merdeka pada pendidikan kejuruan sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya
 - b. Memberikan teori dan ilmu baru dalam kurikulum pendidikan khususnya terkait Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)
- 2) Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman terkait kemajuan penggunaan kurikulum pada siswa program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)
 - b. Bagi Kepala Sekolah dan Guru
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi ilmiah bagi Kepala sekolah dan Guru dalam mengembangkan kurikulum khususnya Kurikulum Operasional Sekolah pada siswa program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)
 - c. Bagi Sekolah
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan untuk mengembangkan kegiatan kurikulum selanjutnya dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas pada siswa program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)
 - d. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memperkaya keilmuan bagi masyarakat tentang implementasi Kurikulum Operasional Sekolah pada program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)

3) Kebijakan

- a. Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan dan penggunaan kurikulum berkelanjutan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat yang sedang membangun.